



2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau TA.2021



BKPP
KAB.MALINAU
2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dalam mencapai misi dan tujuannya serta dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.

Semoga LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Malinau, 14 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU



MARSON,S.H.,MM

Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 196408172001121002





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam satu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP, yaitu dokumen gambaran kinerja instansi pemerintah yang telah disusun dan disampaikan secara sistematis.

Dalam pedoman penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas Ketentuan tersebut diatas dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja dan perencanaan kinerja tahun 2021 maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Substansi Utama LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau Tahun 2021 mengemukakan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, uraian secara sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala yang merupakan penyebab tidak tercapainya realisasi target kinerja serta langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sehingga permasalahan yang sama dapat diminimalisir atau tidak terulang kembali dimasa akan datang. Dari sisi alokasi anggaran, pada tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 10.655.257.659.00,-** yang Terdiri dari Belanja Tidak Langsung **R. 6.454.308.337.00** dan Belanja Langsung berjumlah **Rp 4,200,949,325.00** penjelasan terperinci akan diuraikan dalam pembahasan Bab III dalam laporan ini.

Demikian LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau Tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau.

Malinau, 14 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU**

MARSON, S.H., MM
Pembina Muda IV/C

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) **TAHUN 2021**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN		
A. DASAR PEMBENTUKAN	1
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	3
E. SUMBER DAYA MANUSIA	3
F. PERMASALAHAN UTAMA	4
G. SISTEMATIS PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. Tujuan dan Sasaran	6
2. Indikator Kinerja	7
3. Strategi dan arah kebijakan	7
4. Program	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019	9
C. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	12
C. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	21





BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau merupakan unsur pendukung Tugas Kepala Daerah Kabupaten Malinau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diubah kembali berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau (BKPP) merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Sumber Daya Manusia.
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab.Malinau di Pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan Peraturan Daerah mengenai Kepegawaian.
2. Merencanakan dan mengembangkan Kepegawaian Daerah.
3. Menyiapkan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah.
4. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan/mutasi dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau Fungsional sesuai dengan noma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.



5. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam Pengangkatan, pemindahan/mutasi dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyiapkan dan menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyelenggarakan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Mengolah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
9. Menyampaikan Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau memiliki Fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan & pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Secara singkat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau, maka BKPP kab. Malinau memiliki fungsi Strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.



Secara singkat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, terdiri dari :

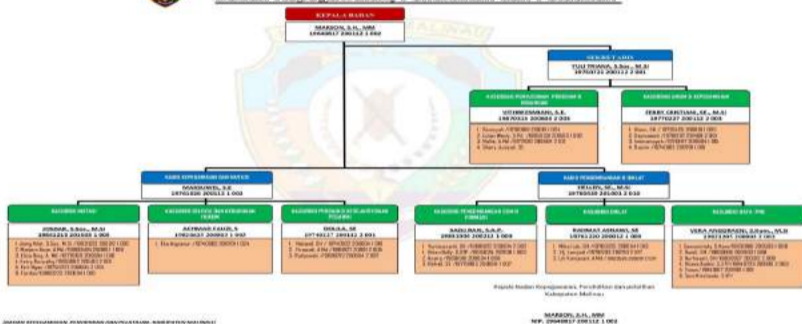
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Keuangan & Penyusunan Program,
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kepegawaian dan Mutasi, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Kedudukan Hukum,
 - b. Sub. Bidang Kesra dan Pensiun Pegawai,
 - c. Sub. Bidang Mutasi.
4. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Pengembangan SDM dan Formasi,
 - b. Sub. Bidang Data Pegawai,
 - c. Sub. Bidang Diklat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional/ tenaga ahli

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau sbb:



STRUKTUR ORGANISASI

(Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan)



JURAN PENGEMBANGAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN, DAN PENGEMBANGAN

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 44 (empat puluh empat) orang pegawai.

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau dapat dikelompokkan ke dalam :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Golongan

1	Golongan IV	:	3 orang
2	Golongan III	:	26 orang
3	Golongan II	:	14 orang
4	Golongan I	:	1 Orang

- Menurut Eselon, pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau dapat dikelompokkan ke dalam :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Eselon

1	Eselon II	:	1 orang
2	Eselon III	:	3 orang
3	Eselon IV	:	8 orang
4	Non Eselon	:	32 orang

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan. Dimana terdapat beberapa jabatan struktural yang memiliki beban kerja yang cukup banyak dan kurangnya staf pelaksana.

F. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau pada saat ini adalah :

- Masih terbatasnya aparatur yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan data kepegawaian.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir PNS dan Penataan SDM aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi.
- Belum seimbangya kebutuhan PNS baru yang berkualitas dengan semakin banyaknya PNS yang pensiun.



- Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai.
- Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan pandemi Covid-19;

G. SISTEMATIS PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau selama Tahun 2021. Pencapaian ini didasari pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tahunan dengan melakukan identifikasi dan analisa sejumlah celah kerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau Tahun 2019 adalah :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi menguraikan latar Dasar Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Permasalahan Utama yang dihadapi Oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab ini memuat Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi Kebijakan dan Program), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan capaian Kinerja organisasi, pengukuran kinerja dan realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih terarah, lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

**“ Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat “**

Sasaran

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu Tahunan, sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

Tujuan dan Sasaran tersebut digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian• Meningkatkan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu• Persentase Sarana dan Prasarana



	Kepegawaian berbasis Teknologi • Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia	kepegawaian yang memadai • Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi
--	---	---

2) Indikator kinerja

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau yang ditetapkan melalui rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau yaitu : Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat. Dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Persentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu
- Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi
- Persentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai.

3) Strategi dan arah kebijakan

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau memiliki 5 (lima) kebijakan, yaitu :

1. Mengirimkan dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi formasi kepegawaian sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.
3. Mengirimkan dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.



4. Membuat acuan / pedoman prosedur kerja.
5. Mengikutsertakan pegawai dalam program asuransi dan dana pensiun.

4) Program

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau telah menetapkan 3 (Tiga) Program Operasional, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program di atas, maka ditetapkan kegiatan dan Sub.Kegiatan untuk tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub.Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub.Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD
2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Sub. Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - 2) Sub.Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
3. Kegiatan Mutasi dan Promosi
 - 1) Sub.Kegiatan Pengelolaan Muatasi ASN
 - 2) Sub.Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3) Sub.Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2) Sub.Kegiatan Pengelolaan Assesment Center
 - 3) Sub.Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.



6. Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan dan Parajabatan
7. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Pembinaan Disiplin ASN

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka melaksanakan tugas tugas pokok, fungsi, wewenang dan pelayanan yang diberikan oleh BKPP Kab. Malinau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada Tahun 2021 Rencana Kinerja Tahunan BKPP Kab.Malinau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	Persentase Sarana dan Prasarana kepegawaian yang memadai	100%
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	100%

Tabel 2.3 Rencana Kerja (RENJA) 2021

No	Program	Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	60 Jenis	Rp 79,574,000.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	Rp 39,450,000.00
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 kali	Rp 197,648,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	Rp 29,380,000.00
		Perawatan dan Perlengkapan Gedung Diklat	1 Tahun	Rp 49,500,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kenaikan Pangkat PNS	500 Orang	Rp 82,796,000.00



		Penetapan NIP CPNS	100 Orang	Rp 20,020,000.00
		Penegakan Hukum Disiplin PNS	15 Orang	Rp 49,423,000.00
		Pelantikan Pejabat Eselon II,III dan IV	200 Orang	Rp 57,045,000.00
4	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS (pensiun)	53 Orang	Rp 39,917,000.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II	3 Orang	Rp 191,544,000.00
		Pelatihan Kepemimpinan Administrator	28 Orang	Rp 193,850,375.00
		Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	120 Orang	Rp 1,689,341,000.00
		Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Magister Hukum kerjasama Pemkab.Malinau dengan Universitas Borneo Tarakan	40 Orang	Rp 640,000,000.00
		Seleksi CPNSD	100 Orang	Rp 29,554,000.00
		Latsar Gol. III dan II	100 Orang	Rp 575,000,000.00
		Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1 Orang	Rp 51,800,000.00
		Penyelenggaraan Program Pendidikan S1. Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners	3 Orang	Rp 91,500,000.00
		Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi S3 Program Doktor Ilmu Manajemen	1 Orang	Rp 100,000,000.00
		Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	100 Orang	Rp 91,500,000.00
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan SIMPEG	4000 PNS	Rp 49,964,000.00
		Peremajaan Aplikasi E-Kinerja ,E-Kehadiran dan E-Dokumen	100%	Rp 119,982,000.00
		Pelatihan Petugas Admin E-Kinerja,E-Kehadiran dan E-Dokumen	160 Orang	Rp 49,713,400.00
		Pengadaan Fingger Print dan Server Lokal	119 Unit	Rp 1,037,982,000.00
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi JPT Pratama	2 Orang	Rp 119,064,000.00
		Assesment Jabatan	600 Orang	Rp 119,894,000.00
		Penghargaan PNS/Satya Lencana	200 Orang	0



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen antara Kepala daerah dengan Kepala SKPD yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Berikut perjanjian Kinerja Tahun Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marson,S.H.,MM

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wempi W. Mawa, S.E

Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%



2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasl	100%
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	Persentase Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 395.552.000,00	APBD
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.750.154.400,00	APBD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2.649.735.375,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 5.795.441.775,00	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipercaya dan diberi tugas untuk membentuk dan mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab.Malinau berkewajiban melaporkan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Laporan capaian kinerja ini merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja di bidang kepegawaian yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab.Malinau. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana. Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, tahun 2020 adalah:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rata-rata % Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kepegawaian	Presentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Sumpah Janji, Penghargaan Satyalencana, dan Penegakan Hukuman Disiplin)	100%	110%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	Presentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai (Pemeliharaan Gedung Diklat dan Pengelolaan SIMPEG dan Pengadaan Finger Print)	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	Presentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi (Diklat PIM II, Diklat PIM III, Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana dan Program Doktorat, Pelantikan Pejabat Struktural, Assesment Center, Seleksi	100%	25%



	JPT)		
--	------	--	--

B. ANALIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kepegawaian	Presentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Sumpah Janji, Penghargaan Satyalencana,)	%	100%	119%	110%
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	Presentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai (Pengadaan Perlengkapan Seleksi CAT, Pemeliharaan Gedung Diklat dan Pengadaan Aplikasi E-Kinerja dan E-Dokumen)	%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	Diklat PIM II, Diklat PIM III, Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana dan Program Doktorat, Pelantikan Pejabat Struktural, Assesment Center, Seleksi JPT)	%	100%	100%	25%

1. Presentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu

Pada Tabel diatas sasaran meningkatnya pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu dengan indikator persentase jumlah pegawai yang dapat menyelesaikan administrasi kepegawaian dengan baik dan tepat waktu untuk tahun 2021 BKPP menetapkan target 100%. Pada tahun 2021 realisasi dari persentase jumlah pegawai



yang menyelesaikan administrasi kepegawaian mencapai 110% dengan capaian kinerja sebesar 110% dari target dimana terdapat deviasi lebih sebesar 10%. Adapun jenis-jenis administrasi kepegawaian adalah sbb:

- 1) Kenaikan Pangkat dengan target 500 PNS realisasi 485 PNS
- 2) Kenaikan Pangkat Pensiun PNS dengan target 53 PNS realisasi 66 PNS
- 3) Penghargaan Satyalencana PNS dengan target 100 PNS realisasi 123 PNS

2. **Presentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai**

Berdasarkan table diatas sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai dengan indikator persentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai untuk tahun 2021 ditetapkan target 100%. Untuk realisasi dari persentase sarana dan prasarana yang memadai mencapai 100% dengan capaian kinerja juga mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya Peralatan Finger Print, Pengelolaan Simpeg, Aplikasi Penilaian Kinerja PNS dan tersedianya pemeliharaan Gedung Diklat BKPP Kab.Malinau.

3. **Presentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi**

Pada Table diatas dapat dilihat sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan indikator kinerja persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, BKPP pada tahun 2021 menetapkan target sebesar 100% dengan realisasi mencapai 25 % dengan capaian kinerja sebesar 25%. Pada indikator kinerja ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Pendidikan S3 Program Doktor sebanyak 2 Orang
- 2) Pelaksanaan Pendidikan S2 UBT sebanyak 44 Orang
- 3) Pelaksanaan Pendidikan Spesialis Dokter sebanyak 1 Orang
- 4) Pelaksanaan Pendidikan S1 Keperawatan 3 Orang
- 5) Pelaksanaan Seleksi CPNS dengan Target yang mengikuti sebanyak 100 orang dengan realisasi sebanyak 100 Orang
- 6) Pelaksanaan Diklat PIM II dengan target 4 orang realisasi 4 Orang
- 7) Pelaksanaan Diklat PIM III dengan Target 40 orang realisasi 0
- 8) Pelaksanaan Diklat PIM IV dengan Target 120 Orang realisasi 0
- 9) Pelaksanaan Latsar dengan target 82 Orang realisasi 82 Orang
- 10) Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural 200 orang realisasi 16 Orang
- 11) Pelaksanaan JPT dengan target 2 orang realisasi 0
- 12) Pelaksanaan Assesment Jabatan dengan Target 600 Orang realisasi 0
- 13) Penegakan hukum disiplin 15 Orang realisasi 21 orang

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Presentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	110	226	284	657	189,92	238,69	119
Presentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100
Presentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	%	25	100	100	100	100	100	100

Pada table diatas untuk kolom pertama Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase jumlah pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu tahun 2021 sebesar 110% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 119%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan penurunan pencapaian kinerja tahun 2021 sebesar 9% terhadap pencapaian tahun 2020. Realisasi kinerja mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan kenaikan persentase jumlah pegawai yang menyelesaikan administrasi tepat waktu ini, hal ini dikarenakan pada pada setiap tahun selalu terjadi penundaan pengurusan administrasi kepegawaian baik kelengkapan berkas yang kurang maupun keterlambatan para pegawai dalam pengusulan administrasi kepegawaian, yang mengakibatkan pada tahun berikutnya akan terjadi penumpukan pengusulan sehingga dapat berpengaruh pada realisasi tahun ke tahun.

Untuk kolom kedua perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai tahun 2021 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2020 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan tidak terdapat kenaikan/penurunan pencapaian kinerja demikian juga pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Selanjutnya pada kolom ketiga perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2010 adalah perbandingan realisasi Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi tahun 2021 dengan realisasi sebesar 25% dan tahun 2020 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan



terdapat penurunan pencapaian kinerja demikian jga halnya pada tahun 2018 dan 2019, hal ini dikarenakan ada 3 Sub.Kegiatan yang tidak dapat di laksanakan yaitu Pelantikan Pejabat Struktural, Lelang Jabatan JPT dan Assesment Jabatan mengingat penetapan anggaran yang tidak pasti pada Tahun 2021 setelah adanya refocusing anggaran dan kondisi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk dilaksankannya asesment jabatan yang mengunmpulkan banyak orang pada ruangan tertutup.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Presentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	110	100	100
Presentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai	%	100	100	100
Presentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	%	25	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah perbandingan:

- 1) Realisasi persentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan adminstrasi kepegawaian tepat waktu tahun 2021 sebesar 110% dengan target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 110% terhadap target akhir Renstra tahun 2021.
- 2) Realisasi persentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai tahun 2021 sebesar 100% dengan target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 100% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir Renstra tahun 2021.
- 3) Realisasi persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi tahun 2021 sebesar 25% dengan target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 100% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir Renstra tahun 2021.



a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2021 persentase penyelesaian adminitrasi kepegawaian, persentase sarana dan prasarana yang memadai serta persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah 100% s/d 110% dengan capain kinerja 100% s/d 119%. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penurunan pencapaian kinerja pada tahun 2021. Namun demikian keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

- 1) Kurang responnya ASN terhadap permintaan data kelengkapan pengusulan berkas.
- 2) Refocussing Anggaran dampak dari Pandemi Covid-19.
- 3) Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap Perundang-Undangan ASN.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
		(%)		(%)
Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kepegawaian	Presentase Jumlah Pegawai yang menyelesaikan administrasi	110%	Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 1. Kenaikan Pangkat PNS	78.44%



	kepegawaian tepat waktu		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Pensiun)	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	Presentase sarana dan prasarana kepegawaian yang memadai	100%	Program Kepegawaian Daerah	86.45%
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	Presentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	25%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.90%
			Kegiatan Serifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Parajabatan	
			Program Kepegawaian Daerah	49.16%
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 1. Pengelolaan Mutasi ASN 2. Pengelolaan Promosi ASN	
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2. Pengelolaan Assesment Center	
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1. Pembinaan Disiplin ASN	

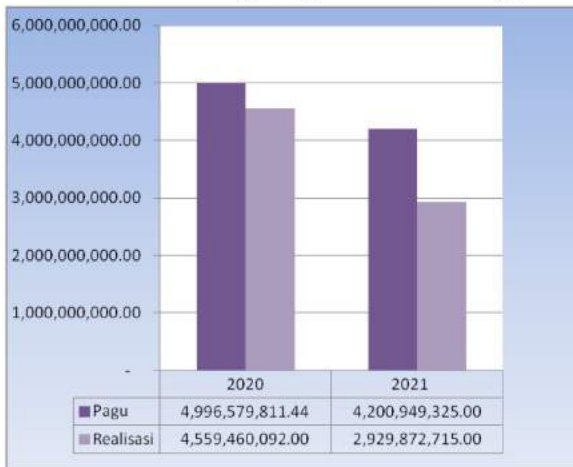


Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya sehingga dapat disimpulkan realiasi anggaran dari setiap program berkisar antara 55.03% - 100% dan total realisasi mencapai 78.33% menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya, hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi SDM Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya Refocussing Anggaran yakni dari Rp 5.806.665.400,00 menjadi Rp 4.200.949.325.00 atau sekitar 0.28%.

Berbanding lurus dengan penurunan pagu anggaran, progres realisasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab.Malinau juga mengalami penurunan yaitu dari 91,25% menjadi 89.36%.



Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2021, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Penyerapan anggaran efektif per bulan yaitu terhitung sejak bulan Agustus sampai Desember 2021, dengan persentase progres yang masih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran untuk indikator Persentase ASN sesuai Kompetensi dan kebutuhan Organisasi masih kurang efektif.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau. Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau adalah sebesar **Rp 6.454.308.334.00** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp 6.163.376.461.00** atau sebesar **95.49 %**. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp 4.200.949.325.00** dan realisasinya sebesar **Rp 2.929.872.715.00** atau sebesar **69.74%**.

Aspek keuangan tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

1). Belanja Tidak Langsung

No.	URAIAN/KEGIATAN /PROYEK	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	6.454.308.334.00	6.163.376.461.00
	Jumlah	6.454.308.337.00	6.163.376.461.00

2). Belanja Langsung

URAIAN/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)
1	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp	57,450,000.00	57,450,000.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	79,574,000.00	79,574,000.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	39,450,000.00	39,450,000.00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	254,962,800.00	143,296,750.00
5	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp	149,116,000.00	92,412,000.00



6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp	38,094,000.00	35,960,000.00
7	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	49,922,000.00	39,129,796.00
8	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp	57,045,000.00	9,300,000.00
9	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp	82,676,000.00	53,138,996.00
10	Pengelolaan Promosi ASN	Rp	308,845,000.00	0.00
11	Peningkatan Kapasitas Kinerja Asn	Rp	49,603,400.00	47,594,000.00
12	Pengeloaan Assesment Center	Rp	241,348,000.00	0.00
13	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp	1,577,021,000.00	1,510,300,000.00
14	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pembinaan	Rp	357,127,900.00	303,620,223.00
15	Pembinaan Disiplin ASN	Rp	49,410,600.00	10,920,000.00
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	49,500,000.00	45,000,000.00
17	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Rp	759,803,625.00	462,726,950.00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp	4,200,949,325.00	2,929,872,715.00



BAB IV PENUTUP

Pelaporan Kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau. Pada awal tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau juga menetapkan Rencana Kerja / Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perjanjian Kinerja yang berisi berisikan target-target kinerja yang pada hakikatnya tertuang dalam kontrak kinerja yang harus dicapai dan harus dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan VISI, MISI dan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka dari tiga sasaran yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2021, secara umum sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan dalam organisasi, sehingga nantinya akan tercapai sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 14 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU



MARSON,S.H.MM

Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 196408172001121002